

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Secara umum, makna hubungan internasional adalah kolaborasi antara negara-negara, yang merupakan entitas politik yang diakui secara global, untuk mengatasi berbagai permasalahan. Hubungan internasional merujuk pada interaksi antara negara-negara, kelompok-kelompok negara, dan masyarakat global, serta kekuatan-kekuatan dan proses-proses yang mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan gaya hidup. Dalam lingkup hubungan internasional, terjadi berbagai macam interaksi antara negara dan komunitas internasional (Darmayadi 2015:22). Menurut K.J. Holsti, konsep hubungan internasional selalu berkaitan dengan berbagai jenis interaksi antara masyarakat negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara itu sendiri (Sitepu 2011:19).

Istilah "hubungan internasional" diciptakan oleh Jeremy Bentham, yang memiliki ketertarikan besar terhadap interaksi antarnegara (Darmayadi 2015:22). Walaupun satu bidang studi dapat berkembang lebih cepat dibandingkan yang lainnya, kemajuan tersebut biasanya diikuti oleh bidang-bidang lain. Ini juga berlaku untuk studi Hubungan Internasional, yang mulai mendapat pengakuan sebagai disiplin tersendiri sekitar tahun 1930-an, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Pengakuan ini sejalan dengan kemajuan ilmu-ilmu sosial yang telah ada pada masa itu, terutama

dalam bidang ilmu politik. Beberapa akademisi menekankan bahwa studi Hubungan Internasional sangat terkait dengan ilmu politik, menyoroti pentingnya analisis fenomena politik di tingkat global (Darmayadi, 2015:17-18).

2.1.2 Kerjasama Bilateral

Teori tentang kerjasama bilateral adalah sebuah konsep dalam studi Hubungan Internasional yang menyoroti pentingnya kolaborasi antara dua negara atau entitas politik untuk mencapai keuntungan bersama. Konsep ini sering diasosiasikan dengan pemikiran dari para ahli Hubungan Internasional seperti John H. Herz dan Karl W. Deutsch.

Dalam bukunya yang berjudul "*International Politics in the Atomic Age*" (1959), John H. Herz membahas ide tentang kerjasama bilateral dalam konteks masa Perang Dingin. Herz berpendapat bahwa dalam era ancaman senjata nuklir, tujuan utama dari hubungan internasional adalah untuk mencegah perang dan memelihara perdamaian. Untuk mencapai hal ini, Herz merekomendasikan bahwa negara-negara harus fokus pada pengembangan hubungan dua-pihak yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menghindari konflik.

Sementara itu, Karl W. Deutsch, dalam karyanya yang berjudul "*The Analysis of International Relations*" (1968), juga menekankan pentingnya kerjasama bilateral dalam konteks hubungan internasional. Deutsch berargumen bahwa kerjasama antara dua negara dapat mengurangi

ketegangan dan meningkatkan pemahaman yang saling menguntungkan, sehingga berpotensi untuk mendukung perdamaian dan stabilitas.

Sedangkan menurut pandangan yang disampaikan oleh Teuku May Rudy (2002:125) dalam karya tulisnya yang berjudul "Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Setelah Era Perang Dingin", beliau mengemukakan bahwa kerjasama bilateral timbul karena adanya keterbatasan sumber daya, kemampuan administratif, dan keterampilan teknis yang dimiliki oleh masing-masing negara. Tujuan dari kerjasama bilateral ini adalah untuk mencapai kemajuan bersama dalam pembangunan ekonomi.

2.1.3 *Non-Traditional Security*

Hubungan internasional yang kian kompleks melahirkan evolusi dalam konsep keamanan. Tak lagi terpaku pada ranah militer dan negara, pembahasan keamanan kini merambah ke area non-militer dan aktor non-negara. Barry Buzan, pakar dari *Copenhagen School*, mempelopori pemikiran ini melalui perspektif konstruktivis.

Dalam bukunya "*The Evolution of International Security Studies*", Buzan bersama Hansen mengusung beberapa ide kunci dalam pendekatan keamanan *non-traditional* :

1. Fokus Melampaui Keamanan Negara: Keamanan bukan hanya milik negara, tetapi juga individu, kelompok, lingkungan, dan planet Bumi.
2. Memahami Sumber Ancaman: Ancaman tak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negara.

3. Memperluas Cakupan Kajian: Studi keamanan tak hanya fokus pada militer, tetapi juga mencakup sektor ekonomi dan lingkungan.
4. Keamanan Lebih dari Sekadar Ketakutan: Keamanan bukan hanya tentang perasaan terancam, tetapi juga tentang upaya melawan dan mendominasi.
5. Konsep keamanan non-tradisional ini menandai pergeseran paradigma, dari fokus pada "*interstate relations*" ke "keamanan individu"

Perkembangan ini dipicu oleh berakhirnya Perang Dingin dan tragedi 11 September 2001, yang menunjukkan bahwa kelompok teroris, bukan negara, menjadi sumber ancaman utama. Menurut Buzan, ada lima faktor yang memengaruhi perkembangan studi keamanan, yaitu politik kekuatan besar, teknologi, peristiwa, institusionalisasi, dan debat akademik. Faktor pertama, politik kekuatan besar, terlihat dari persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama beberapa dekade di era Perang Dingin. Faktor kedua, teknologi, ditunjukkan oleh kemajuan dalam transportasi, komunikasi, dan persenjataan militer. Faktor ketiga, peristiwa, merujuk pada setiap fenomena atau kejadian yang dapat mempengaruhi pandangan dan hubungan internasional. Faktor keempat adalah institusionalisasi, yang mencakup pembentukan institusi atau program baru dalam penelitian hubungan internasional, seperti kemunculan lembaga riset dan studi baru di dunia akademik. Terakhir, faktor debat akademik, di mana Buzan dan Hansen (2009) menekankan pentingnya analisis dalam ilmu sosial untuk memahami

dan meneliti isu-isu dalam hubungan internasional (Barry Buzan & Lene Hansen, 2009).

2.1.4 Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Kepentingan nasional adalah konsep fundamental yang menjadi landasan bagi sebuah negara dalam membangun kerjasama dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Ini merupakan elemen kunci dalam politik luar negeri dan hubungan internasional yang bersifat realistik, karena kepentingan nasional memandu langkah-langkah politik yang diambil oleh suatu negara.

Kepentingan nasional muncul dari kebutuhan suatu negara dan dapat terlihat dari kondisi internalnya, seperti aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan militer. Kepentingan ini juga berhubungan dengan keinginan untuk membangun pengaruh yang kuat, sehingga negara dapat memengaruhi keputusan dan memperoleh pengakuan di tingkat internasional. Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai aktor utama yang mengambil keputusan dan memiliki peranan penting dalam hubungan internasional, serta memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di dalam negeri.

Dalam bukunya "*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*" (1962:80), Hans J. Morgenthau mengartikan kepentingan nasional sebagai "konsep yang menggambarkan apa yang dianggap sebagai kebutuhan pokok oleh para pembuat kebijakan suatu negara untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraannya."

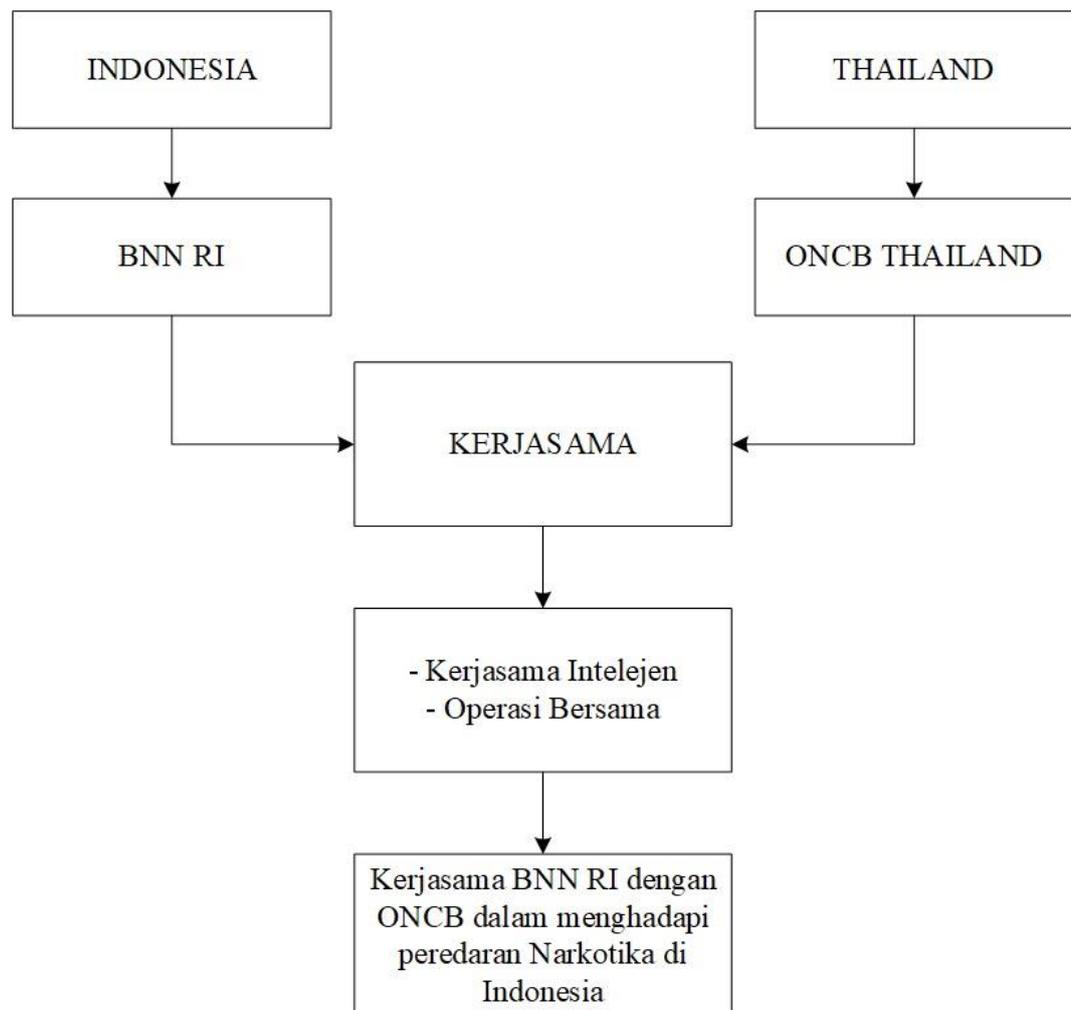
Morgenthau mengidentifikasi tiga kategori utama kepentingan nasional:

1. Keamanan: Keharusan untuk menjaga negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar.
2. Kesejahteraan: Keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat.
3. Status: Keharusan untuk mencapai dan mempertahankan pengakuan serta pengaruh di arena internasional.

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional bersifat objektif dan konsisten. Artinya, kepentingan tersebut tidak berubah seiring waktu dan tidak dipengaruhi oleh ideologi atau nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin negara. Namun, strategi untuk mencapai kepentingan nasional bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan sumber daya yang tersedia. Morgenthau juga menekankan bahwa kepentingan nasional berada dalam hierarki. Ini berarti ada kepentingan yang lebih utama daripada yang lain dalam suatu konteks tertentu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013: 67) kerangka konseptual adalah rangkaian pikiran atau struktur penyelidikan yang menjadi pola atau dasar pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang dituju merupakan fondasi yang penting. Dengan demikian, kerangka konseptual berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam menyelidiki suatu objek, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pikiran

Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh kerjasama dua pihak, yaitu Badan Narkotika Nasional Indonesia dan *The Office of the Narcotics Control Board*, terhadap penanggulangan peredaran Narkotika (Ganja dan Pil Yaba) dengan memberantas rantai peredarannya melalui Thailand di Indonesia dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Melalui kerjasama ini, terjadi peningkatan kerjasama inteljen dan operasi Bersama yang dilakukan oleh kedua pihak, merujuk pada kepentingan nasional Thailand dan Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh kerjasama tersebut terhadap situasi di Indonesia.